

DAMPAK POLITIK PRAKTIS ASN DALAM PILKADA 2020 DI DESA FATUMUTI, KECAMATAN NOEMUTI, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Oscar A.T. Berkanis

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana

Email: oscarberkanis320@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :25-12-2025

Revised :07-01-2026

Accepted :15-01-2026

Keywords: Practical politics, Civil Servants, 2020 Pilkada, bureaucratic neutrality, public services.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study examines the impact of practical politics on Civil Servants (ASN) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Fatumuti Village, Noemuti Subdistrict, North Central Timor Regency. The involvement of ASN in political contestation has become a critical issue as it affects bureaucratic neutrality, work professionalism, and the quality of public services. The background of this research highlights the shifting role of ASN, who are supposed to remain neutral, but are often drawn into the dynamics of practical politics due to pressure and the interests of political elites. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consist of ASN who directly experienced the impact of practical politics during and after the election. The data were analyzed systematically through reduction, presentation, and conclusion drawing to provide an empirical picture of the situation in the field. The findings reveal that practical politics in the 2020 election resulted in two main patterns: revenge politics and reward politics. ASN perceived as being in opposition to the new authorities were often subject to job transfers, delayed promotions, or removal from strategic positions. Conversely, those who supported the winning candidates were rewarded with promotions or positions, not always based on competence. This situation created bureaucratic injustice and weakened the merit system principle. Another impact identified

was the obstruction of career development, decreased work motivation, and a sense of insecurity among ASN. Practical politics also reduced the quality of public services, as appointments were no longer based on expertise but on political closeness. This not only harmed ASN individually but also disadvantaged the broader community, who are entitled to professional and quality public services. The study concludes that practical politics worsens local governance, undermines bureaucratic neutrality, and threatens the quality of local democracy. Therefore, it recommends strengthening regulations on ASN neutrality, consistent implementation of the merit system, and enhancing the understanding of public administration ethics. These measures are essential to rebuild a neutral, professional, and integrity-based bureaucracy oriented toward the public interest..

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak politik praktis terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Fenomena keterlibatan ASN dalam kontestasi politik menjadi isu penting karena berimplikasi pada netralitas birokrasi, profesionalisme kerja, serta kualitas pelayanan publik. Latar belakang penelitian ini menyoroti adanya pergeseran peran ASN yang seharusnya netral, namun kerap terseret dalam dinamika politik praktis akibat tekanan dan kepentingan elit politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari ASN yang mengalami langsung dampak politik praktis pada masa dan pasca Pilkada. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga mampu menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik praktis dalam Pilkada 2020 menimbulkan dua pola utama, yaitu politik balas dendam dan politik balas jasa. ASN yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa baru sering mengalami mutasi, penundaan promosi, bahkan penyingkiran dari jabatan strategis. Sebaliknya, ASN yang mendukung kandidat pemenang justru memperoleh jabatan atau promosi meskipun tidak selalu berdasarkan kompetensi. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan birokrasi dan memperlemah prinsip merit sistem. Dampak lain yang ditemukan adalah terhambatnya karier ASN, menurunnya motivasi kerja, serta munculnya rasa tidak aman dalam birokrasi. Praktik politik praktis ini juga berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik, karena penempatan jabatan tidak lagi didasarkan pada keahlian,

tetapi pada kedekatan politik. Hal tersebut tidak hanya merugikan ASN secara individu, tetapi juga masyarakat luas yang berhak atas pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik praktis memperburuk tata kelola pemerintahan daerah, melemahkan netralitas birokrasi, dan mengancam kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya penguatan regulasi terkait netralitas ASN, penerapan merit sistem secara konsisten, serta peningkatan pemahaman etika administrasi negara. Upaya tersebut penting untuk membangun birokrasi yang netral, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan publik.

PENDAHULUAN

Tulisan ini mengkaji mengenai dampak politik praktis ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 aparatur sipil negara (ASN) di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2020 terjadi pemilihan kepala daerah 2020. Pilkada TTU adalah peristiwa penting dan krusial dalam sistem demokrasi Indonesia. Pilkada TTU tidak hanya melibatkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi juga melibatkan seluruh komponen warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih sesuai undang-undang. Salah satu elemen warga Negara yang sudah memiliki hak pilih sesuai undang-undang adalah aparatur sipil Negara (ASN) yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan termasuk politik dan segala dinamikanya. Berhadapan dengan realitas politik praktis, dimana para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertindak cepat dan efisien meskipun di anggap pragmatis. Di titik ini, menurut buku politik dan pembangunan Indonesia, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa negosiasi, kompromi dan perhitungan kepentingan walaupun melampaui batas dan aturan, sehingga sadar atau tidak elemen ASN ditarik dan masuk didalam dinamika dan realitas ini. Berbagai strategi dipasang oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah contohnya, janji jabatan untuk ASN dan isu-isu sensitive lainnya demi peroleh dukungan dan suara. ASN juga memiliki pilihan dan keberpihakan secara sadar dan bertanggung jawab menunjukkan gestur keberpihakannya pada calon tertentu walaupun integritas sebagai ASN harus menjadi taruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian terhadap dampak dari politik praktis dalam Pilkada 2020 bagi ASN, untuk memahami sejauh mana pengaruhnya terhadap profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana politik praktis dalam Pilkada 2020 memengaruhi ASN, serta dampaknya terhadap netralitas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah sepuluh ASN yang dipilih secara purposive. Penelitian ini bersifat non-eksperimental karena variasi dari setiap variabel tidak disebabkan oleh perlakuan peneliti. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara rinci dan mendalam. Aplikasinya yaitu bahwa peneliti kualitatif pada waktu memasuki penelitian kualitatif tentu merasa asing dengan obyek tersebut. Penelitian ini non eksperimental, karena variasi dari setiap variabel tidak disebabkan oleh adanya perlakuan dari peneliti. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang Dampak Politik Praktis ASN Dalam Pilkada 2020 Di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan studi kasus Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 merupakan topik yang menarik dan relevan dalam konteks dinamika politik lokal. Dampak yang berimbas akibat politik praktis yang menimpa ASN dalam Pilkada Timor Tengah Utara tahun 2020 semakin menarik untuk dibahas tuntas dalam penelitian ini. Penelitian ini mencoba menggali apa saja yang menyebabkan ASN bisa terkena dampak dari praktek politik praktis. Secara aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat tentang kepatuhan terhadap aturan dan regulasi : ASN harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas. Dalam prakteknya ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan seorang ASN bisa terkena imbas atau dampak dari Politik praktis, diantaranya adalah faktor pribadi seorang ASN, faktor keluarga, ada faktor lain seperti lingkungan tempat kerja dan juga lingkungan tempat tinggal. Peneliti menemukan beberapa fakta lapangan yang menjelaskan dan tentunya memberikan informasi baru mengenai dampak politik yang terjadi ketika adanya pergantian kepemimpinan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 peneliti akhirnya menemukan dan mengetahui dampak dari politik, bentuk politik praktis, serta faktor-faktor terjadinya politik praktis terhadap para ASN.

Dampak Politik praktis yang peneliti temukan yakni :

1. Politik Praktis Sebagai “Media Balas Dendam”
2. Politik Praktis Sebagai “Media Balas Jasa”
3. Politik Sebagai Penghambat Karier seorang ASN

Bentuk-bentuk Politik Praktis :

1. Menjadi Tim Sukses
2. Mempengaruhi Orang Lain
3. Memobilisasi Sumber Daya Pemerintah

4. Politik Balas Dendam

5. Politik Balas Jasa

6. Pengelompokan ASN (Kelompok Aman vs Tidak Aman)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi ASN terlibat dalam Politik Praktis :

1. Faktor Kekeluargaan

2. Faktor Balas Jasa terhadap Pemimpin

3. Faktor Jabatan dan Karier

4. Faktor Lingkungan dan Tekanan Sosial

Dalam penelitian ini, praktik politik praktis di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan digunakan secara strategis oleh pemimpin daerah pasca Pilkada. ASN yang dianggap loyal diberi jabatan strategis (politik balas jasa), sedangkan ASN yang dianggap berseberangan dimutasi atau disingkirkan (politik balas dendam). Relasi ini menciptakan bentuk “disiplin kekuasaan” sebagaimana yang digambarkan oleh Foucault. Foucault menyebut bahwa kekuasaan selalu beroperasi melalui mekanisme “normalisasi” yaitu menciptakan standar perilaku yang dianggap benar dan menekan perilaku yang dianggap menyimpang. Dalam kasus ini, pemimpin daerah pasca Pilkada berperan sebagai “otoritas penentu norma”, yang menetapkan siapa ASN yang dianggap “aman” dan siapa yang dianggap “bermasalah”. Akibatnya, ASN di TTU terbelah menjadi dua kelompok sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian, yaitu kelompok “aman” (pendukung pemenang Pilkada) dan kelompok “tidak aman” (ASN yang dianggap berseberangan). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam birokrasi lokal tidak lagi bersifat administratif, tetapi telah menjadi instrumen dominasi politik. Sebagaimana dijelaskan Foucault, kekuasaan tidak perlu selalu represif, melainkan cukup dengan membentuk perilaku dan kesadaran ASN agar tunduk pada sistem politik yang berkuasa. Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Utara, kekuasaan politik pasca Pilkada 2020 berhasil menundukkan birokrasi melalui praktik mutasi, promosi selektif, dan penciptaan “kelompok aman dan tidak aman”.

Fenomena ini memperkuat temuan bahwa politik praktis telah mengubah birokrasi menjadi ruang pertarungan kekuasaan, di mana ASN tidak lagi bebas secara profesional, melainkan harus beradaptasi dengan struktur kekuasaan yang berlaku. Imbasnya tidak hanya pada individu ASN, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah, yang seharusnya menjadi institusi netral, rasional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Politik Praktis ASN dalam Pilkada 2020 di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa politik praktis memiliki pengaruh besar terhadap dinamika birokrasi. Pergantian kepemimpinan pasca Pilkada bukan hanya membawa perubahan kebijakan, tetapi juga berimplikasi langsung pada posisi dan jabatan ASN. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem birokrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat rentan terhadap intervensi politik, sehingga profesionalisme ASN sering kali terabaikan. Penelitian ini menemukan bahwa politik praktis sering dimanfaatkan sebagai media balas dendam dan balas jasa. ASN yang dianggap berseberangan dengan kepentingan politik penguasa kerap menjadi korban mutasi atau pencopotan jabatan tanpa dasar yang jelas. Sebaliknya, mereka yang dianggap dekat dengan pemimpin atau tim pemenang Pilkada memperoleh keuntungan berupa promosi jabatan maupun penempatan strategis, meskipun tidak selalu sesuai dengan kompetensi. Kondisi ini mencerminkan bahwa merit sistem dalam birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (2021). Pendidikan politik kepemimpinan dan kepeloporan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (Vol. 2). Jakarta: Kencana.
- Iskandar, D., & Pd, M. (2009). Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press.
- Miriam, B. (1993). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morrisan, M. A. (2012). Metode penelitian survei. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). Metode penelitian bisnis untuk skripsi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Surbakti, R. (2018). Memahami ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyanto, B. (2015). Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan. Jakarta: Prenada Media.
- Widjaja, A. W. (2006). Administrasi kepegawaian. Jakarta: Rajawali.
- Gunanto, D. (2020). Politisasi birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
- Haryadi, T., Praptono, E., & Pratama, E. A. (2019). Implikasi hukum terhadap pembatasan peran serta aparatur sipil negara dalam proses politik di Indonesia. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 43–67. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.67>
- Kalangi, R. (2015). Pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 2(1), 1–18.
- Kebung, K. (2017). Membaca “kuasa” Michel Foucault dalam konteks “kekuasaan” di Indonesia. Jurnal Melintas, 33(1), 34–51. https://www.researchgate.net/publication/342792872_Membaca_%27Kuasa%27_
- Lastiwi, D. T., & Suryono, F. (2022). Strategi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan arah kebijakannya: Sebuah literature review. Nusantara Innovation Journal, 1(1), 38–46.
- Nadeak, L. (2021). Klerikus dilarang berpolitik praktis: Promosi agar klerikus aktif berpolitik kepedulian sosial. LOGOS, 12(2), 90–101. <https://doi.org/10.54367/logos.v12i2.1467>

- Rakhmawanto, A., Soetoyo, J. M., & Timur, C. J. (2020). Analisis politisasi birokrasi dalam pembinaan aparatur sipil negara.
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada untuk mewujudkan good governance. *Syntax Idea*, 6(1). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>
- Universitas Tompotika Luwuk, & Barri, A. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap larangan berpolitik praktis bagi pemerintah desa pada pemilihan umum. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.446>
- Definition of politic. (2024, June 7). In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/politic>